Muslim Indonesia Paling Toleransi

Oleh Dr. Erwan Efendi, S. Sos, MA

Bagi pemerintah Indonesia, kejadian di Myanmar harus menjadi masukan dan kajian secara serius. Sebab, pada dasarnya peristiwa itu terjadi hanya karena kekhawatiran bahwa minoritas muslim Rohingya akan menjadi ancaman.

Tidak ramai suara internasional yang mengecam apalagi mengutuk ketika ratusan muslim Rohingya di Myanmar dibantai sehari menjelang Hari Raya Qurban (Idul Adha) 2017. Begitu juga negara-negara yang selalu berlindung di balik HAM (Hak Asasi Manusia) seperti Amerika Serikat, hingga kini tidak memberi komentar apa pun terhadap peristiwa yang mengenaskan itu.

Kini sudah 400 orang Rohingya meninggal dan 600 ribu mengungsi, sementara pembunuhan terus terjadi, dan setiap hari puluhan bahkan ratusan muslim Rohingya disiksa dan meninggal dunia. Ironisnya pembantaian itu bukan hanya dilakukan oleh masyarakat Myanmar yang mayoritas beragama Budha tetapi kebejatan mereka didukung pula oleh pemerintah dan militer. Sehingga tentara dan polisi bersenjata lengkap ikut melakukan eksekusi tanpa memiliki rasa kemanusiaan. Tidak hanya itu, kejahatan kemanusiaan itu dilakukan dan dimotori pula oleh para tokoh agama Budha yang disebut-sebut Biksu Asin Wirathu. Sebagai pemimpin agama, para biksu semakin menyemarakan kebencian yang sangat dalam terhadap muslim Rohingya. Bahkan, kebencian masyarakat Myanmar itu disebarkan melalui kuil-kuil di seluruh Myanmar oleh para sami-sami.

Sungguh luar biasa kebencian terhadap muslim Rohingya di Myanmar, mereka bukan hanya dibunuh oleh masyarakat yang ilmu dan pengamalan agamanya relatif rendah, tapi juga oleh para biksu, orang yang mempunyai ilmu agama yang luas dan pengamalan cukup konsisten. Jadi, peran tokoh agama yang seharusnya membawa kesejukan dan kedamaian cukup besar dalam pembunuhan dan pengusiran terhadap muslim Rohingya. Begitupun, tidak ada satu negara yang menyatakan bahwa tindakan pemerintah, masyarakat dan tokoh agama Myanmar itu sebagai teroris. Berbeda jika hal itu dilakukan oleh orang muslim, membawa alat peledak saja dan belum lagi meledak bisa disebut teroris. Apalagi jika membunuh manusia seperti di Myanmar.

Tindakan genosida (pembantaian untuk penghapusan etnis) yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan tokoh agama Budha di Myanmar itu, sungguh sangat melukai hati umat Islam di muka bumi ini. Apalagi muslim di Indonesia yang jumlahnya terbesar. Muslim Rohingya disiksa dengan berbagai cara dan dibunuh. Rumah tempat tinggal berikut isinya dibakar dan mereka diusir dari tempat tinggalnya. Masjid dan toko-toko sebagai tempat ibadah dan usaha tidak luput dari pemberangusan. Bahkan ada yang dibakar hidup-hidup. Sebagai saudara seiman, tentu tidak dapat menerima tindakan itu, apapun alasannya. Tidak rela kalau saudara-saudaranya sesabdah diperlakukan layaknya bahkan lebih seperti hewan.

Tidak hanya itu, pemerintah Myanmar telah pula mengeluarkan undang-undang yang dikenakan kepada masyarakat muslim Rohingya; mereka tidak diboleh kawin, tidak diboleh memiliki harta benda dan tidak diboleh memiliki anak. Undang-undang itu jelas melanggar HAM, karena tiga hal tersebut adalah merupakan hak yang paling asasi. Undang-undang itu dikeluarkan oleh pemerintah Myanmar hanya karena perbedaan agama dan warna kulit. Penganut Budha Myanmar menilai keberadaan muslim Rohingya akan membahayakan penduduk Myanmar karena mereka menganut agama Islam. Alasan itu sangat tidak logis dan sulit diterima akal sehat. Sebab, pada kenyataannya di Negara manapun, jika masyarakatnya mayoritas muslim tidak pernah terjadi penzaliman dalam bentuk apapun. Karena Islam adalah *rahmatan lil'alamin* (rahmat bagi semua alam dan isinya).

Indonesia sebagai negara yang berpenduduk mayoritas muslim hingga kini tidak ada satu undang-undang pun yang melarang penganut agama lain untuk tidak boleh kawin, tidak boleh memiliki harta benda dan tidak boleh memiliki anak atau keturunan. Negara mayoritas muslim ini memberikan kebebasan bahkan perlindungan bagi penganut di luar muslim untuk kawin dan memilih anak baik bagi penduduk pribumi maupun nonpribumi. Bahkan mereka mempunyai lebih banyak keturunan dibanding masyarakat muslim atau pribumi. Mereka memiliki kebebasan untuk kawin atau tidak, begitu juga untuk memiliki keturunan. Apalagi dalam kepemilikan harta benda.

Indonesia adalah merupakan salah satu negara paling toleran, bahkan mungkin satu-satunya negara tidak pernah membatasi warganya dengan alasan perbedaan agama, warna kulit, etnis, adat budaya untuk memiliki harta benda dan kekayaan. Secara kasat mata semua bisa melihat dan mengetahui bahwa sesungguhnya orang terkaya di negeri ini adalah bukan penganut agama mayoritas. Tetapi, mereka yang menjadi millyoner itu adalah saudara kita minoritas. Bahkan keberadaan mereka berstatus yang diwarganegarakan sesuai undang-undang bukan memang asli warga negara. Mereka menguasai hampir secara totalitas berbagai sektor ekonomi termasuk yang menjadi hajat hidup orang banyak yang seharusnya dikuasai/dikelolah oleh negara.

Mereka juga menguasa hampir sepenuhnya sektor keuangan. Lebih dari itu, saat ini selain menguasai sektor ekonomi dari hulu hingga hilir, mereka juga diboleh kan merambah masuk ke bidang politik, eksekutif, legislatif dan lain-lain. Minoritas juga sudah menguasai hampir lebih 75 persen lahan-lahan yang memiliki potensi ekonomi, memiliki tempat tinggal yang mewah yang sulit didapat dan dinikmati oleh masyarakat mayoritas. Begitulah jauh dan besarnya kebebasan yang diberikan mayoritas kepada minoritas di negara ini. Muslim sebagai agama mayoritas di Indonesia paling toleransi terhadap siapa pun. Jadi, jika orang minoritas berada di mayoritas muslim pasti ada kesempatan bagi minoritas. Akan tetapi, sebaliknya jika muslim berada di lingkungan mayoritas nonmuslim bukan mendapat kesempatan tetapi adalah pembantaian, seperti di Rakhine (Myanmar) dan Thailand selatan. Mayoritas Ibu Pertiwi tidak pernah memprotes dalam bentuk apapun terhadap kepunyaan yang dimiliki oleh minoritas. Bahkan mayoritas meraasa senang, bangga dan bahagia meskipun harus menjadi kuli di negeri sendiri

Sektor agama, sesungguhnya muslim Indonesia memiliki toleransi yang cukup tinggi. Mereka membangun dan bahkan menjaga secara maksimal kerukunan antaraumat beragama yang sudah kondusif. Umat Islam tidak pernah memprotes dan melarang aga-ma lain melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya. Pembangu-nan rumah ibadah terlaksana dengan lancar dan aman sepanjang memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan. Tidak ada kekhawatiran umat Islam di Indonesia seperti yang dibayangkan oleh biksu di Myanmar bahwa agama Islam akan menjadi ancaman. Keberadaan agama lain akan dirajut menjadi mitra dan teman sebagai sebuah potensi dalam membangun negara kesatuan ini. Tidak ada kekhawatiran umat muslim di Indonesia khususnya di Sumatera bahwa keberadaan agama Budha di daerah ini khususnya apalagi di Indonesia akan menjadi ancaman meski-pun mereka sudah membangun vihara terbe-sar Asia di kompleks perumahan Cemara, Deli Serdang dan sejumlah daerah lainnya. Padahal dari vihara yang mega dan besar itu akan menghasilkan dan terus melahirkan biksu-biksu baru dan muda sebagai tenaga penyebaran ajaran Budha. Pertumbuhan vihara juga cukup signifikan bahkan jika dilihat mungkin tidak sebanding dengan jumlah penganut agama Budha.

Penutup

Kebiadaban pemerintah, pemuka agama dan masyarakat Myanmar sudah di luar batas kemanusian. Mereka bukan hanya mengusir muslim Rohingya dari tempat tinggalnya akan tetapi melakukan pembunuhan tanpa melihat jenis, usia, dan penghancuran harta benda hanya karena perbedaan agama. Kita yakin tidak terjadi bahkan tidak akan terjadi pembalasan umat Islam terhadap biksu-biksu di Indonesia, karena mereka adalah saudara sebangsa dan setanah air. Oleh karena itu, biksu Asin Wirathu harus diseret ke pengadilan internasional, sebab telah dan sedang melakukan kejahatan kemanusiaan yakni genosida.

Bagi pemerintah Indonesia, kejadian di Myanmar harus menjadi masukan dan kajian secara serius. Sebab, pada dasarnya peristiwa itu terjadi hanya karena kekhawatiran bahwa minoritas muslim Rohingya akan menjadi ancaman. Justru, untuk mengantisipasi kemungkinan itu sebagai umat mayoritas mereka mengkabsi muslim Rohingya. Bukan tidak mungkin hal serupa juga akan terjadi di Indonesia ketika mereka sudah memiliki kekuatan yang berimbang setelah menguasai berbagai sektor-sektor penting termasuk oknum-oknum pejabat negara. Mengantisipasi itu, pemerintah harus membuat regulasi agar semua mendapatkan kesempatan yang sama. Bahan terhadap pribumi harus memiliki nilai plus, karena nenek moyang dan orang tua mereka adalah pejuang yang memerdekakan Indonesia. Jika tidak atau belum mampu, itu adalah kewajiban negara untuk mengadvokasinya, sehingga tidak menjadi kuli di negeri sendiri. Semoga!

Penulis adalah Humas Waspada

Pengumuman

Redaksi menerima kiriman karya tulis berupa artikel/opini, surat pembaca. Kirim ke alamat redaksi dengan tujuan 'Redaktur Opini *Waspada*' dengan disertai CD atau email: opiniwaspada@yahoo.com. Panjang artikel 5.000-10.000 karakter dengan dilengkapi biodata dan kartu pengenal (KTP) penulis. Naskah yang dikirim adalah karya orisinil, belum/tidak diterbitkan di media manapun. Isi tulisan menjadi tanggung jawab penulis.

SUDUT BATUAH

* **Ketua DPRD Sumut: Semua partai ada 'kuman'**
  - Cuma beda jenisnya gitu ya pak?

* **Pendidikan karakter jangan hanya teori**
  - Apalagi pencitraan

* **Cagubsu, Demokrat usung JR Saragih**
  - Agak lapang dada lae, he...he...he

9/9 2017

Dipindai dengan CamScanner